

**UPAYA INTERNATIONAL CENTRE FOR SETTLEMENT OF INVESTMENT
DISPUTES (ICSID) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDAGANGAN
ROKOK (STUDI KASUS URUGUAY DAN PHILIP MORRIS)**

Oleh : M Iqbal Sidiq, 1701114115

(email : igbaljane231@gmail.com)

Pembimbing : Indra Pahlawan, S.IP., M.Si

Bibliografi : 16 Jurnal, 17 Buku, 7 Website Resmi, 2 peraturan Perundang-Undangan,
37 Artikel.

Jurusan Hubungan Internasional – Ekonomi dan Politik Internasional

Ilmu Sosial Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya km. 12,5 Simpang Baru – Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

This study discusses ICSID's efforts to resolve the cigarette trade dispute between Uruguay and Philip Morris. Philip Morris sued Uruguay to ICSID with violations committed by Uruguay in the form of its government policies, namely Regulation 80/80 and Ordinance 514.

This study uses descriptive method with a qualitative approach which emphasizes the disclosure strategy made by PT. Glico Wings in marketing ice cream in Indonesia. Research data obtained from books, journals, official documents and websites that support the author's hypothesis. The author uses the perspective of liberalism and the level of analysis of multinational corporations (MNCs) according to Patric Morgan. And the theory used in this research is the theory of competitive advantage (Competitive Advantage) by Michael Porter. According to Porter, strategy allows organizations to gain a competitive advantage from three bases: cost leadership, differentiation and focus.

The results showed that the tribunal results from ICSID were in favor of Uruguay and required Philip Morris to drop all charges and pay a fine of USD 7 million.

Keywords: Liberalism, The Role of International Organizations, Trade Disputes

PENDAHULUAN

Industri rokok dapat dipandang sebagai industri dengan perputaran uang besar. Perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam industri ini menghabiskan uang dalam nominal jutaan Dollar Amerika. Dalam tahun 2016, perusahaan-perusahaan industri rokok menghabiskan dana 9,5 miliar Dollar Amerika sebagai pengeluaran pemasaran.¹ Industri rokok merupakan beberapa cabang industri yang dikenal dengan baik oleh pasar.

Menurut data dari World Bank, Australia menempati posisi pertama sebagai prevalensi oleh rokok dengan 33,4% dari jumlah penduduk sedangkan Amerika Utara menempati posisi terendah dengan persentase 15,25%. Pada sisi lain, Rusia menempati posisi pertama sebagai negara dengan jumlah perokok terbanyak yaitu 35 juta penduduk dan Peru sebagai negara dengan jumlah perokok terendah yaitu 1,5 juta penduduk.

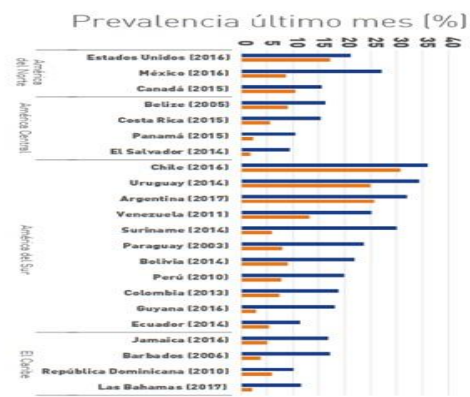
Pada wilayah Amerika latin, Laki-laki memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan, terlepas dari upaya jangka panjang industri tembakau untuk menargetkan perempuan dalam strategi pemasaran dan periklanannya. Amerika Latin dan Karibia menduduki peringkat kedua oleh WHO, terkait tingkat konsumsi tembakau wanita yang lebih tinggi, setelah Eropa.

Pengembangan industri rokok menempatkan negara-negara di wilayah Amerika Latin sebagai salah satu tujuan perdagangan. Jumlah perokok, secara akumulatif, kawasan yang berada di Amerika Latin terbilang banyak, yaitu

mencapai angka 145 juta perokok.² Pada tahun 2015, agar sesuai dengan tahun rilis data angka perokok, jumlah populasi yang ada di wilayah kawasan Amerika Latin mencapai angka 626 juta jiwa.³ Berdasarkan data diatas, fakta menunjukkan total 23% penduduk Amerika Latin merupakan perokok.

Chili, Uruguay, dan Argentina memiliki tingkat konsumsi tertinggi di antara wanita (lihat grafik yang menunjukkan konsumsi tembakau pada populasi umum menurut jenis kelamin dan negara, dengan data berwarna biru untuk pria dan data dengan warna oranye untuk wanita) pada grafik 1.1:

Grafik 1.1 *Prevalencia Ultimo Mes (%)*



Pasar tembakau di Amerika Latin dan Karibia didominasi oleh Philip Morris International (PMI) dan British American Tobacco (BAT). Pada 1990-an, BAT menguasai 60% pasar tembakau, dengan PMI menguasai 40% sisanya, dan beberapa kehadiran kecil dari Japan International Tobacco di Bolivia. Namun, pada akhir 2000-an, Philip Morris mulai

¹ Tobacco Industry Marketing”, Centers for Disease Control and Prevention (https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/facts_sheets/tobacco_industry/marketing/index/htm) Diakses pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 20.36

² Weekly Chart: Tobacco Use in Latin America”, Americas Society/ Council of the Americas, 29 Mei 2015

³ Latin America Population 2020”, World Population Review (<https://worldpopulationreview.com/continent/latin-america-population/>) Diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 08.37

membeli produsen lokal dan merek tembakau.⁴ Berdasarkan hal itu, PMI mengalami peningkatan pengaruh dalam pasar tembakau di Uruguay.

Penggunaan produk rokok oleh warganegara Uruguay dapat dipahami sebagai bentuk kerugian terhadap pengembangan sumber daya manusia dan sisi ekonomi warganegara. Setiap tahun, terdapat angka kematian yang disebabkan oleh rokok sebesar 5.100 jiwa.⁵ Angka regenerasi perokok tetap berada dikisaran yang tinggi karena terdapat 6000 anak-anak (berusia 10-14 tahun) dan 501.000 dewasa (berusia lebih dari 15 tahun) yang masih menggunakan produk rokok dalam frekuensi harian. Sebagai dampaknya, tingkat mortalitas akibat penggunaan produk rokok mencapai angka 22.06 persen di tahun 2016.

Sejak 1990-an, ketegangan antara perdagangan dan pengendalian tembakau telah meningkat karena aturan hukum baru mengenai kekayaan intelektual dan investasi asing telah memungkinkan investor (termasuk perusahaan tembakau) untuk menentang kebijakan kesehatan masyarakat domestik di perdagangan internasional dan pengadilan arbitrase investasi.⁶ Perusahaan tembakau melobi negara-negara dalam Perjanjian Umum tentang Tarif dan Perdagangan dan investasi di ICSID (*Internasional Center for the Settlement of Investment Disputes*) untuk mengajukan sengketa perdagangan terhadap kebijakan pengendalian tembakau negara-negara yang meratifikasinya.

⁴ Cigar production in Latin America”, bbc <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44035162>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 18.03

⁵ Uruguay”, The Tobacco Atlas <https://tobaccoatlas.org/country/uruguay/>> Diakses pada tanggal 10 Maret 2020 pukul 09.54

⁶ Mamudu HM, Hammond R, Glantz SA. International trade versus public health during the FCTC negotiations, 1999-2003. *Tob Control* 2011;20:e3.

KERANGKA TEORI

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode penelitian dengan metode analisis data kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data primer dan data sekunder. Penelitian ini menggunakan perspektif Liberalisme. Menurut James Rosenau, Liberalisme Merupakan suatu proses di mana hubungan internasional dilaksanakan oleh pemerintah yang disertai juga oleh adanya hubungan antar-individu, antar-kelompok dan antar-masyarakat swasta yang dapat memiliki konsekuensi penting bagi berlangsungnya peristiwa.⁷

Anggapan ini mengacu dengan semakin kecilnya keterlibatan pemerintah akan menyebabkan semakin meningkatnya hubungan antar-bangsa di dunia. Konferensi kepemudaan seperti International Youth Conference adalah bentuk transnasionalisme antar individu yang berhasil mempertemukan pemuda-pemuda potensial dari berbagai bangsa untuk membicarakan solusi dari berbagai macam isu internasional kontemporer

Perspektif ini penulis gunakan karena Fokus penelitian ini adalah penelitian tentang Sengketa Perdagangan Rokok antara Uruguay dan Philip Morris, khususnya pada permasalahan Investasi. Sebagai aktor pembuat penengah, ICSID berhak menjadi lembaga yang akan membentuk peradilan.

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan Negara

⁷ Sitepu, Anthonius. 2011, Studi Hubungan Internasional, Yogyakarta, Graha Ilmu

Bangsa (*nation state*) sebagai tingkat analisa. Karena alasan yang terkait dengan hubungan internasional adalah negara, dengan asumsi bahwa semua pembuat keputusan, di mana pun mereka berada, pada dasarnya berperilaku sama ketika dihadapkan pada situasi yang sama. Jadi, untuk menganalisis langkah-langkah diplomatik yang dilihat sebagai akibat dari tekanan politik, ideologi, opini publik atau kebutuhan ekonomi dan sosial domestik. Ketentuan domestik memutuskan kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan.⁸

PERAN-FUNGSI ICSID DAN KEPENTINGAN NASIONAL URUGUAY DALAM FCTC

International Center Settlement for Investment Dispute (ICSID) merupakan institusi internasional yang secara eksklusif melakukan penanganan terhadap sengketa investasi oleh investor dengan negara tempat investor melakukan investasi, untuk diselesaikan melalui tribunal ad hoc yang dibentuk melalui institusi ini. Dalam mempromosikan pembangunan ekonomi internasional, maka dibentuklah institusi ini yang dirancang untuk mempromosikan penyelesaian sengketa antara negara dengan investor asing. Pembentukan dan operasi institusi ini diatur melalui Konvensi ICSID. Konvensi ICSID mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa investasi internasional yang lebih lanjut secara khusus diatur dalam perjanjian bilateral investasi maupun perjanjian perdagangan bebas yang telah berlaku sejak 1965 dan mengikat 20 negara.

Isu sengketa investasi internasional pertama kali digaungkan melalui suatu institusi internasional yang bernama ICSID. International Centre for Settlement of Investment Dispute

merupakan institusi internasional yang dicetuskan oleh Bank Dunia (World Bank). Ketika ICSID dibentuk, Washington D.C. ditetapkan sebagai tempat kedudukan permanen institusi ini dan berafiliasi dengan Bank Dunia. Pertama kali ICSID dibentuk, hanya 20 negara yang menjadi negara anggota dari institusi ini. Sebanyak 20 negara yang meratifikasi ICSID tersebut dijadikan sebagai negara pionir keanggotaan berdirinya ICSID sebagai badan penyelesaian sengketa investasi internasional.⁹

Konsep perlindungan investasi pertama kali dikenal 60 tahun silam, dan kurang lebih 30 tahun terakhir, perlindungan investasi tersebut kemudian disempurnakan dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang dikenal sebagai ISDS dari ICSID yang telah menciptakan peraturan multi-layered mengenai mekanisme penyelesaian sengketa ISDS yang sekarang telah terdapat dalam BIT yang kurang lebih berjumlah 3000 BITs.

Standarisasi sengketa di ISDS merupakan bagian dari sistem Hukum Investasi Internasional yang tidak terpisahkan satu sama lain. Prinsip dalam ISDS digunakan untuk mencegah suatu negara untuk mengambil langkah yang tidak adil, baik secara langsung maupun tidak langsung bagi aset dari investor serta memberikan kompensasi kepada investor ketika hal tersebut terjadi yang menyebabkan kerugian bagi investor. Singkatnya, ISDS bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap bingkai aturan yang aman dan dapat diprediksi bagi investor internasional serta untuk memfasilitasi keputusan dan

⁸ Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. Yogyakarta:LP3ES, hal. 45

⁹ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*. hlm. 59

investasi. Prinsip-prinsip dalam ISDS sangat erat kaitannya dengan Hak negara untuk mengatur (The right to regulate), Hak negara untuk mengatur lahir dari putusan arbitrase yang bertujuan untuk memperjelas ambiguitas dari klausula perjanjian mengenai Investasi Internasional. Hak negara untuk mengatur memiliki dua tujuan dasar yaitu Hak negara untuk mengatur investasi asing untuk mempromosikan pembangunan nasional prioritas dan Hak negara untuk mengatur sebagai bentuk perlindungan terhadap kesejahteraan masyarakat dari dampak negatif investasi, baik secara individual maupun kumulatif, dari investasi domestik dan asing secara seimbang.¹⁰

Sejak tahun 1990, epidemi tembakau menjadi suatu masalah kesehatan publik yang mengakibatkan hampir 5 juta orang yang meninggal setiap tahunnya. Jika kondisi ini menetap, diperkirakan 10 juta orang meninggal pada tahun 2030 dimana 70% nya terjadi di negara berkembang. Penyebaran epidemi tembakau ini dipengaruhi oleh beberapa faktor lintas batas negara termasuk liberalisasi perdagangan dan investasi asing. Selain itu, faktor lain seperti pemasaran global, pengiklanan lintas negara dan penyelundupan rokok ilegal juga ikut berkontribusi terhadap peningkatan konsumsi tembakau (rokok). Semua faktor itu kini tengah berlangsung di negara-negara berkembang karena aturan pengendalian tembakau masih sangat longgar.¹¹

Atas keprihatinan tersebut kemudian WHO membentuk suatu Konvensi Pengendalian Tembakau yaitu *Framework Convention On Tobacco*

Control dalam menanggapi epidemi tembakau di dunia. FCTC menyediakan suatu kerangka bagi upaya pengendalian tembakau untuk dilaksanakan oleh pihak-pihak baik dalam tingkat nasional, regional dan internasional.¹²

Uruguay adalah salah satu pemimpin global dalam menangani campur tangan industri tembakau. Konvensi tidak hanya memberikan dasar dari peraturan Uruguay, tetapi juga berfungsi sebagai kerangka kerja untuk tantangan hukum yang diluncurkan terhadap negara tersebut baik di pengadilan nasional maupun internasional. Pada tahun 2010, Philip Morris International (PMI) meluncurkan tantangan hukum terhadap kemasan produk tembakau Uruguay dan peraturan pelabelan. Karena upaya yang tidak berhasil untuk meningkatkan pangsa pasar mereka, produsen tembakau multinasional menutup operasinya di Uruguay. BAT dan Abal Hermanos (dimiliki oleh PMI), menutup pabriknya masing-masing pada tahun 2010 dan 2011.

Uruguay telah mencapai keberhasilan dalam menangani ketergantungan tembakau dengan mengikuti Pasal 14 Konvensi. Metode berhenti merokok berbasis bukti diperkenalkan dan keefektifannya dievaluasi. Sejak 2008, pengobatan ketergantungan tembakau diintegrasikan ke dalam Sistem Kesehatan Nasional di tingkat kesehatan dasar. Pada 2009, terapi penggantian nikotin (NRT) tersedia tanpa resep. Pada tahun 2013, keluar dari jalur telepon bebas pulsa nasional diluncurkan.

Dalam memenuhi

¹⁰ S. Spears. "The Question for Policy Space in a New Generation of International Investment Agreements," 13 *Journal of International Economic Law* 1037. 2010, hlm. 4

¹¹ World Health Organisation, 2008, WHO report on the Global Tobacco Epidemic, The MPOWER package, Geneva. Hlmn 2

¹² Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013, Pentingnya Akses Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) bagi Indonesia, PT.Gramedia, Jakarta, Hlmn 1

kewajiban FCTC berdasarkan Pasal 12 Konvensi, Pemerintah Uruguay telah melaksanakan kampanye pendidikan berkelanjutan yang menghasilkan dukungan kuat untuk tindakan pengendalian tembakau baik di antara perokok maupun non-perokok. Pada tahun 2006, lebih dari 1 juta tanda tangan dikumpulkan untuk kampanye yang sangat inklusif yang disebut “A Million Thanks” yang berterima kasih kepada perokok karena menghormati lingkungan bebas asap. Kampanye lebih lanjut dilakukan pada tahun 2007, 2012 dan 2013 dengan fokus pada efek kesehatan yang berbahaya dan masalah khusus gender.¹³

KRONOLOGIS DAN FAKTOR PENYEBAB SENGKETA DAGANG ROKOK URUGUAY DENGAN PHILIP MORRIS

Industri tembakau merupakan salah satu industri yang paling menguntungkan karena untuk memasarkan produknya, Industri ini menggunakan kekayaan dan pengaruh mereka yang sangat besar secara lokal dan global. MONTEPAZ merupakan perusahaan 100 % di Uruguay dengan tradisi tembakau asli. Industri tembakau berdiri pada tahun 1880 perusahaan ini didirikan oleh Julio Mailhos, dengan memulai produksi industri tembakau di dalam negeri.

1. Kebijakan dan Kepentingan serta Harmonisasi Pasar Rokok di Uruguay

Kasus ini menyangkut sengketa yang diajukan ke ICSID berdasarkan Pasal 10 Perjanjian antara Konfederasi Swiss dan Republik Oriental Uruguay tentang Promosi dan Perlindungan Timbal Balik dari Investasi (termasuk Iklan Pasal 10 dari Protokol rusak) tanggal 7 Oktober

¹³ Uruguay's Victory Also a Win For the FCTC, <https://www.fctc.org/uruguay-s-victory-also-a-win-for-the-fctc/> diakses pada 05 November 2020

tahun 1988 (Swiss-Uruguay BIT) yang mulai berlaku pada tanggal 22 April 1991. Philip Morris menyatakan bahwa Tindakan yang Uruguay merupakan pelanggaran terhadap kewajiban Uruguay berdasarkan BIT:¹⁴

- a) Pasal 3 (1) (penurunan nilai penggunaan dan kenikmatan investasi), 3 (2) (perlakuan yang adil dan merata dan penolakan keadilan),
- b) 5 (pengambilalihan)
- c) 11 (ketaatan pada komitmen).

Pelanggaran ini memberikan hak kepada Philip Morris untuk mendapatkan kompensasi berdasarkan Traktat dan hukum internasional. Philip Morris selanjutnya mengklaim kerusakan yang timbul dari dugaan pelanggaran ini.

Pada 21 Mei 2003 yang Dunia Kesehatan Organisasi menyimpulkan dengan Kerangka Kerja Konvensi Pengendalian Tembakau (FCTC). Uruguay menandatangani FCTC pada 19 Juni 2003 dan meratifikasinya pada 9 September 2004, menjadi Negara Amerika Latin pertama yang melakukannya. FCTC mulai berlaku pada 27 Februari 2005. Keanggotaannya saat ini mencakup 180 negara anggota.¹⁵

FCTC dikatakan sebagai perjanjian berbasis bukti yang menyediakan kerangka kerja untuk langkah-langkah pengendalian tembakau yang akan diterapkan oleh Para Pihak di tingkat nasional,

¹⁴ Swiss-Uruguay BIT, <https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/3121/download> diakses pada 05 November 2020

¹⁵ What's the FCTC, <https://www.fctc.org/what-is-the-fctc/> diakses pada 07 November 2020

regional dan internasional untuk mengurangi prevalensi secara terus menerus dan substansial penggunaan tembakau dan paparan asap tembakau.

Pada 18 Agustus 2008, mengambil ketentuan dari Pasal 44 dari Konstitusi, FCTC, UU No. 18.256 dan Keputusan 284, Menteri Kesehatan Uruguay membuat kebijakan Ordonansi 514 yang mulai berlaku pada bulan Februari tahun 2009.¹⁶

Ordonansi 514 mensyaratkan penggunaan pictogram yang terdiri dari lima gambar yang digabungkan dengan lima pernyataan untuk dicetak pada 50% area tampilan (setengah bagian bawah) dari semua bungkus rokok dan produk tembakau. Pasal 2 Ordonansi mensyaratkan legenda di sisi paket.¹⁷

Pada 15 Juni 2009, Keputusan Presiden 287/009 diberlakukan. Ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2009. Pasal 1 mengamanatkan peningkatan ukuran peringatan kesehatan pada bungkus rokok dari 50 s/d 80 persen bagian bawah tiap sisi utama setiap bungkus rokok.¹⁸

Dari tahun 1998 hingga 2006, prevalensi merokok pada orang dewasa tetap sekitar 32%. Namun, bukti dokumenter menunjukkan bahwa penggunaan tembakau di Uruguay telah menurun selama dekade terakhir. Menurut Kebijakan Pengendalian Tembakau 2014 International Tobacco Control (ITC), tingkat prevalensi perokok menurun ke 25% di 2009, dan kemudian 23,5% pada tahun 2011. Data

¹⁶ Campaign for Tobacco, https://www.tobaccofreekids.org/assets/content/press_office/2016/2016_07_12_uruguay_factsheet.pdf diakses pada 07 November 2020

¹⁷ Ordinance 514, <https://www.tobaccocontrol.org/litigation/decisions/uy-20160708-philip-morris-srl-v-uruguay> diakses pada 07 November 2020

¹⁸ PMI vs Oriental Of Uruguay, <https://www.jstor.org/stable/10.5305/amerjintelaw.110.4.0774> diakses pada 09 November 2020

resmi dari Centro de Investigacion de la Epidemia del Tabaquismo (CIET), menunjukkan bahwa prevalensi perokok di Uruguay telah turun ke 20% di 2012 dan 19% pada tahun 2013.¹⁹

Tidak diragukan lagi bahwa setelah berlakunya SPR, Abal menghilangkan tujuh dari tiga belas variannya (yaitu Marlboro Gold, Marlboro Blue, Marlboro Fresh Mint, Fiesta Blue, Fiesta 50/50, Phillip Morris Blue, dan Premier).²⁰

PEMBENTUKAN PANEL ISDS-ICSID DALAM MENYELESAIKAN

SENGKETA DAGANG ROKOK PHILIP MORRIS vs URUGUAY

1. Pembentukan Panel

Pada 22 Februari 2010, ICSID menerima permintaan untuk arbitrase tanggal 19 Februari 2010. Pada tanggal 1 September 2010, Philip Morris menunjuk Tn. Gary Born, seorang warga negara AS, sebagai arbitrator. Bapak Born menerima pengangkatannya pada tanggal 3 September 2010. Pada tanggal 24 September 2010, Uruguay menunjuk Prof. James R. Crawford AC, SC, warga negara Australia, sebagai arbitrator. Prof. Crawford menerima pengangkatannya pada tanggal 1 Oktober 2010. Bapak Born dan Prof. Crawford tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai ketua arbiter ketiga. Organisasi ICSID bertanggung jawab untuk menunjuk Presiden Tribunal. Pada 9 Maret 2011 Prof. Piero

¹⁹ Tobacco Effects, <https://www.tobaccofreekids.org/what-we-do/global/legal/trade-and-investment/philip-morris-v-uruguay> diakses pada 09 November 2020

²⁰ Tobacco Control, <https://tobaccotactics.org/wiki/philip-morris-vs-the-government-of-uruguay/> diakses pada 09 November 2020

Bernardini, seorang warga negara Italia, sebagai Presiden peradilan menerima pengangkatannya pada 15 Maret 2011.

Philip Morris menantang dua persyaratan pengemasan dan pelabelan pengendalian tembakau yang diterapkan oleh Uruguay masing-masing pada tahun 2008 dan 2009:²¹

- a. Persyaratan untuk peringatan kesehatan grafis besar yang mencakup 80% permukaan luar depan dan belakang bungkus rokok ('Peraturan 80/80'), meningkat dari persyaratan sebelumnya yaitu 50% dari permukaan luar depan dan belakang.
- b. Persyaratan bahwa merek rokok memiliki penyajian tunggal, yang berarti bahwa produsen tembakau tidak boleh memproduksi lebih dari satu varian dari satu kelompok merek rokok ('persyaratan penyajian tunggal'). Persyaratan penyajian tunggal ditujukan untuk mencegah 'kesan palsu bahwa produk tembakau tertentu kurang berbahaya dibandingkan produk tembakau lainnya' sejalan dengan kewajiban dalam WHO FCTC pasal 11.1 (a), dengan mencegah penggunaan variasi warna dalam suatu kelompok merek. untuk menunjukkan bahwa rokok tertentu lebih sehat daripada yang lain (mis. kemasan biru atau putih untuk rokok 'mild' atau 'light').

Pengadilan mengadakan sebuah pertama sesi dengan para pihak pada 25 Mei 2011. Para Pihak menegaskan bahwa Anggota Pengadilan telah secara sah ditunjuk. Disepakati antara lain bahwa Peraturan Arbitrase yang berlaku akan berlaku mulai 10 April. Para Pihak juga menyepakati jadwal untuk fase

²¹ Request for Arbitration, <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0343.Pdf>, diakses pada 28 December 2020

yurisdiksi dari persidangan, termasuk pembuatan dokumen. Kesepakatan Para Pihak dituangkan dalam Risalah Sidang Pertama yang ditandatangani oleh Presiden dan Sekretaris peradilan dan diedarkan kepada Para Pihak pada tanggal 1 Juni 2011.

2. Temuan Panel

Berdasarkan jadwal yang telah disepakati pembelaan pada yurisdiksi, Uruguay mengajukan Memorial pada 24 September 2011. Sidang tentang yurisdiksi diadakan pada tanggal 5 dan 6 Februari 2013, di Paris.²² Informasi mengenai mereka yang hadir di persidangan dan rincian tambahan termasuk dalam Keputusan Pengadilan tentang Yurisdiksi.

Pada 2 Juli 2013 pengadilan mengeluarkan sebuah keputusan tentang Yurisdiksi menegaskan bahwa yurisdiksi atas klaim yang diajukan oleh penggugat. Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peradilan ini dan dilampirkan sebagai Annex A.

Panel ISDS-ICSID memutuskan akan melaksanakan yurisdiksi atas sengketa tersebut. Pengadilan menyatakan bahwa yurisdiksinya atas yang penyangkalan dari keadilan klaim, yang telah dimasukkan dalam satu RFA, dan ditetapkan berdasarkan aturan dari ICSID, dan bahwa hal ini yurisdiksi atas semua klaim didasarkan pada dugaan pelanggaran. Secara khusus memutuskan sebagai berikut:²³

²² An Analysis of Tobacco Control Measures in the Context of International Investment Law, <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0345.pdf>, diakses pada 28 Desember 2020

²³ ISDS panel, <https://www.italaw.com/sites/default/file>

- a. Bahwa Panel ISDS-ICSID melaksanakan yurisdiksi atas klaim yang diajukan oleh Philip Morris Brands Sàrl, Philip Morris Products SA dan Abal Hermanos SA sejauh yang didasarkan pada dugaan pelanggaran Perjanjian tentang Promosi Timbal Balik dan Perlindungan Investasi yang disimpulkan pada 7 Oktober 1988 antara Swiss. Konfederasi dan Republik Oriental Uruguay;
- b. Bahwa Panel ISDS-ICSID melaksanakan yurisdiksi berdasarkan aturan ICSID dari klaim Penuntut atas penolakan keadilan;
- c. Untuk membuat pesanan yang diperlukan untuk kelanjutan dari prosedur sesuai dengan Arbitration Rule 41 (4); dan
- d. Untuk menyimpan semua pertanyaan tentang biaya dan pengeluaran proses arbitrase untuk penentuan selanjutnya.

Pada tanggal 7 Agustus 2013, Para Pihak mengajukan usulan jadwal prosedural untuk pengajuan pembelaan tentang manfaat, yang disetujui oleh Pengadilan pada tanggal 19 Agustus 2013.

Berdasarkan jadwal pembelaan yang disepakati, Penggugat mengajukan Memorial on the Merits pada 3 Maret 2014. Pada tanggal 22 September 2014, Para Pihak mengajukan jadwal prosedural yang telah direvisi untuk pengajuan pembelaan yang tersisa atas jasa, yang telah disetujui oleh Pengadilan pada tanggal 23 September 2014.

Pada tanggal 13 Oktober 2014, Termohon mengajukan Kontra Peringatan atas Kelayakan sesuai dengan jadwal pembelaan yang disepakati. Pada tanggal 28 November 2014, penggugat mengajukan permohonan dengan

Pengadilan untuk menyesuaikan dengan jadwal untuk membuat dokumen. Pada 3 Desember 2014, Termohon meminta Pengadilan untuk menyetujui jadwal baru untuk produksi dari dokumen yang disepakati oleh para Pihak.

Pada 4 Desember 2014, Pengadilan menyetujui jadwal revisi untuk pembuatan dokumen yang disetujui oleh Para Pihak. Pada 17 Desember 2014, kedua Pihak mengajukan tanggapan mereka terhadap permintaan dokumen yang dipertukarkan, sesuai dengan jadwal yang disetujui untuk pembuatan dokumen. Pada tanggal 30 dan 31 Desember 2014, Para Pihak menyampaikan balasan atas tanggapan permintaan dokumen yang diajukan oleh masing-masing Pihak.

Pada tanggal 8 dan 9 Januari 2015, Termohon dan Pengadu disampaikan pengamatan di sehubungan dengan itu balasan untuk para tanggapan untuk para dokumen produksi permintaan yang telah dikirim ke Pengadilan pada 30 dan 31 Desember tahun 2014. Pada 13 Januari 2015, Pengadilan mengeluarkan Perintah Acara No. 2 tentang pembuatan dokumen.

Pada 30 Januari 2015, Organisasi Kesehatan Dunia (“WHO”) dan Konvensi Kerangka Kerja WHO tentang Sekretariat Pengendalian Tembakau (Sekretariat FCTC) mengajukan permintaan untuk mengajukan pengajuan tertulis sebagai pihak yang tidak berselisih, berdasarkan Arbitrase ICSID Aturan 37 (2).

Pada tanggal 9 Februari 2015, masing-masing Pihak mengajukan pengamatan tentang permohonan pihak yang tidak berselisih, seperti yang diperintahkan oleh Pengadilan. Pada 12 Februari 2015, yang Tribunal diberikan cuti untuk

s/case-documents/ita0345.pdf, diakses pada 07 Februari 2020

para WHO dan para FCTC Sekretariat untuk mengajukan pengajuan sesuai ditulis ke ICSID Arbitration Rule 37 (2) dan memberitahu Pihak yang selanjutnya akan mengeluarkan faktor penyebab keputusan.

Pada tanggal yang sama, *amicus curiae* brief WHO dan Sekretariat FCTC tertanggal 28 Januari 2015 (“WHO Amicus Brief”) dikirimkan ke Para Pihak dan Pengadilan. Dalam *amicus* brief, WHO dan Sekretariat FCTC menyimpulkan bahwa:

“Tindakan yang diambil oleh Uruguay itu diambil dari bukti bahwa label peringatan bahaya rokok yang lebih besar merupakan cara yang efektif untuk menginformasikan konsumen mengenai risiko terkait dengan konsumsi tembakau dan dari mengecilkan konsumsi tembakau. Ada juga tubuh besar bukti [sic] yang melarang merek varian adalah cara yang efektif untuk mencegah menyesatkan merek dari tembakau produk. Ini tubuh dari bukti, yang adalah konsisten dengan praktik negara, dukung kesimpulan bahwa tindakan Uruguay yang dimaksud adalah cara efektif untuk melindungi kesehatan masyarakat.”

Alasan Pengadilan untuk keputusannya 12 Februari 2015 diberikan dalam Perintah Acara No. 3 pada 17 Februari 2015. Dalam Perintah ini, Pengadilan menyatakan, antara lain bahwa:

“Bermanfaat untuk proses pengambilan keputusan dalam hal ini mengingat kontribusi pengetahuan tertentu dan keahlian dari dua kualifikasi entitas [yang WHO dan para FCTC Sekretariat] tentang yang hal-hal dalam sengketa. Ini menganggap bahwa mengingat kepentingan publik yang terlibat dalam kasus ini, mengabdikan Permintaan akan mendukung transparansi persidangan dan penerimaannya oleh pengguna secara luas.”

Pengadilan memutuskan untuk

memungkinkan para pengajuan oleh Pemohon dari Submission dalam sidang sesuai ini Peraturan 37 (2). Pada 6 Maret 2015, Pan American Health Organisation (“PAHO”) mengajukan permintaan untuk mengajukan pengajuan tertulis sebagai pihak yang tidak berselisih, sesuai dengan ICSID Arbitration Rule 37 (2).

Seperti yang diinstruksikan oleh Pengadilan, pada 16 Maret 2015 masing-masing Pihak mengajukan pengamatan atas permintaan PAHO untuk mengajukan pengajuan tertulis sebagai pihak yang tidak berselisih. Pada tanggal 18 Maret 2015, Pengadilan memutuskan untuk memberikan izin PAHO untuk mengajukan pengajuan tertulis sesuai dengan Peraturan Arbitrase ICSID 37 (2) dan menginformasikan Para Pihak bahwa selanjutnya akan mengeluarkan keputusan yang beralasan.

Pada tanggal yang sama *amicus curiae* brief PAHO tertanggal 6 Maret 2015 (“PAHO Amicus Brief”) dikirimkan ke Para Pihak dan Pengadilan. Dalam pengajuannya, PAHO menyimpulkan bahwa:

“PAHO dan Negara Anggotanya secara terbuka mengakui dan mendukung penuh upaya Uruguay untuk melindungi warganya dari efek berbahaya konsumsi tembakau, termasuk melalui penerapan Aturan 80% dan Aturan Penyajian Tunggal dan telah menyatakan keprihatinan mereka yang mendalam tentang kampanye informasi yang salah dan hukum. tindakan yang dilakukan oleh industri tembakau terhadap pengendalian tembakau.”

PAHO mendukung pertahanan Uruguay atas Aturan 80% dan SPR,

yang bertujuan untuk menyelamatkan nyawa, dan mengakuinya sebagai teladan bagi Kawasan dan dunia. Uruguay tembakau kontrol tindakan yang merupakan wajar dan bertanggung jawab respon terhadap menipu strategi periklanan, pemasaran dan promosi yang digunakan oleh industri tembakau, mereka berdasarkan bukti, dan mereka telah terbukti efektif dalam mengurangi konsumsi tembakau. Untuk alasan sederhana ini, industri tembakau terpaksa menantang mereka. (catatan kaki dihilangkan).

Pada 19 Maret 2015, masing-masing Pihak mengajukan observasi ke WHO Amicus Brief. Alasan Pengadilan atas keputusannya pada tanggal 18 Maret 2015 diatur dalam Perintah Prosedural No. 4 tanggal 20 Maret 2015. Pada tanggal 24 Maret 2015, Pengadilan mengeluarkan versi revisi dari Perintah Prosedural No. 4, sebagaimana disepakati oleh Para Pihak. Dalam Perintah ini, Pengadilan mengikuti alasan yang sama seperti dalam perintahnya yang memberikan akses ke Sekretariat WHO dan FCTC dan menyatakan bahwa:

“Penyerahan mungkin bermanfaat untuk proses pengambilan keputusannya dalam hal ini dengan mempertimbangkan kontribusi pengetahuan dan keahlian tertentu dari entitas yang memenuhi syarat, seperti PAHO, mengenai masalah yang disengketakan. Ini menganggap bahwa mengingat kepentingan publik yang terlibat dalam kasus ini, mengabaikan Permintaan akan mendukung transparansi persidangan dan penerimaannya oleh pengguna secara luas.”

Pengadilan telah memutuskan untuk mengizinkan para pengajuan oleh para Pemohon dari para Submission di ini melanjutkan sesuai untuk Peraturan 37 (2). Pada tanggal 18 April 2015, Penggugat mengajukan Balasan tentang Merits. Pada tanggal 18 Mei 2015,

masing-masing Pihak mengajukan observasi atas Amicus Brief PAHO.

Pada 22 Juli 2015, Avaaz Foundation (“Avaaz”) mengajukan permintaan untuk mengajukan pengajuan tertulis sebagai pihak yang tidak bersengketa, sesuai dengan Peraturan Arbitrase ICSID 37 (2). Sebagaimana diinstruksikan oleh Majelis, masing-masing pihak mengajukan observasi pada 6 Agustus 2015 terkait permintaan Avaaz untuk mengajukan pengajuan tertulis sebagai pihak yang tidak bersengketa.

Pada 4 Agustus 2015, Centre memberi tahu para Pihak dan Pengadilan bahwa Ms. Mairée Uran Bidegain, Penasihat Hukum ICSID, akan bertindak sebagai Sekretaris Majelis untuk sisa kasus tersebut. Pada 7 Agustus 2015, Pengadilan mengeluarkan keputusan yang menolak petisi Avaaz untuk mengajukan pengajuan tertulis sebagai pihak yang tidak bersengketa.

Setelah mempertimbangkan petisi dan dalil masing-masing Para Pihak, Pengadilan menyimpulkan bahwa:

“Dugaan “komposisi keanggotaannya yang unik”, satu-satunya dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, belum cukup menjadi dasar untuk menilai bahwa Avaaz Foundation dapat menawarkan suatu perspektif, pengetahuan atau wawasan tertentu yang berbeda dengan para pihak yang bersengketa maupun yang relevan dengan arbitrase ini.”

Pengadilan selanjutnya mencatat bahwa, sebagaimana diakui oleh Pemohon, Permohonan diajukan terlambat dalam persidangan, ketika salah satu Pihak telah mengajukan semua permohonan tertulis yang dijadwalkan kepada Majelis.

Intervensi dari non bersengketa pihak karena dapat mengganggu para melanjutkan dan tidak adil prasangka salah satu Pihak.

Pada 14 September 2015, Asosiasi Kekayaan Intelektual Inter-Amerika (dalam bahasa Spanyol, Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, (“ ASIPI ”)) mengajukan permintaan untuk mengajukan pengajuan tertulis sebagai pihak yang tidak bersengketa, sesuai dengan ICSID Arbitration Rule 37 (2).

Pada 22 September 2015, masing-masing Pihak mengajukan pengamatan atas permintaan ASIPI untuk mengajukan pengajuan tertulis sebagai pihak yang tidak berselisih, seperti yang diperintahkan oleh Pengadilan. Pada 24 September 2015, Pengadilan mengeluarkan keputusan yang menolak petisi oleh ASIPI untuk mengajukan pengajuan tertulis. Setelah meninjau dengan cermat petisi dan dalil masing-masing Para Pihak, Pengadilan menyatakan antara lain sebagai berikut:

“Berdasarkan [Arbitrase Peraturan 37 (2)], Majelis tidak hanya harus mempertimbangkan apakah orang atau organisasi yang berupaya untuk campur tangan memiliki keahlian atau pengalaman yang diperlukan, tetapi juga apakah itu cukup independen dari yang bersengketa pihak untuk menjadi dari bantuan untuk para Pengadilan. Sebelum ICSID pengadilan telah mengakui pentingnya kurangnya hubungan antara pemohon dan yang bersengketa pihak untuk para pengadilan ini tekad untuk menerima atau menolak non-bersengketa pihak kiriman.”

Termohon telah dibawa ke perhatian Tribunal, yang “dekat hubungan antara ASIPI dan pengadu,” dengan mengidentifikasi partisipasi pengacara Pengadu di dalam manajemen papan dan pada tertentu tematik komite dari ASIPI. Pengadilan tidak dapat mengabaikan informasi rinci ini.

Pengadilan menyoroti bahwa Petisi

telah diajukan sedikit lebih dari satu bulan sebelum dimulainya persidangan untuk tahap manfaat dari proses ini. Konsisten dengan yang sebelumnya penentuan pada ini pertanyaan, yang Pengadilan menganggap bahwa ini terlambat intervensi akan mengganggu para persidangan, terlalu membebani dan tidak adil merugikan para Pihak, termasuk di koneksi dengan persiapan mereka saat sidang yang akan datang.²⁴

3. Keputusan Panel

Menurut untuk Pasal 61(2) dari para ICSID Konvensi dan Peraturan 47 (1) (j) dari para Aturan Arbitrase, Pengadilan harus memutuskan, sebagai bagian dari pengadilan, pembagian dari biaya yang dikeluarkan oleh para Pihak sebagai baik sebagai dari yang biaya dan biaya dari para anggota dari para Pengadilan dan biaya untuk penggunaan fasilitas dan layanan dari Pusat.

Masing-masing Pihak telah meminta kepada Pengadilan agar biaya sehubungan dengan proses ini, termasuk uang muka yang dibuat ke ICSID untuk biaya Pusat dan biaya serta pengeluaran arbiter, diganti oleh Pihak lainnya. Penggugat telah menghitung biaya mereka dalam jumlah total US \$ 16.906.045,46. Termohon telah menghitung total biaya sebesar US \$ 10.319.833,57. Pengadilan mencatat bahwa berdasarkan Pasal 61 (2) Konvensi ICSID, ia memiliki keleluasaan luas dalam hal alokasi biaya. Secara spesifik, Pasal 61 (2) menyatakan bahwa:

“Menilai biaya yang dikeluarkan oleh pihak

²⁴ Jurisdiction,

<https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1259.pdf>, diakses pada 2 Februari 2020

sehubungan dengan proses, dan akan memutuskan bagaimana dan oleh siapa mereka biaya, yang biaya dan biaya dari para anggota dari Pengadilan dan biaya untuk penggunaan fasilitas dari para Pusat wajib harus dibayar. Seperti keputusan akan membentuk bagian dari para penghargaan.”

Konvensi ICSID dan Aturan Arbitrase menawarkan sedikit panduan tentang bagaimana kebijaksanaan ini akan dilaksanakan. Dikatakan bahwa “praktek Pengadilan ICSID dalam membagi biaya tidak jelas dan tidak seragam.”⁸⁴² Dalam beberapa kasus prinsip yang kalah membayar “(disebut juga sebagai” biaya mengikuti peristiwa”), biasanya diterapkan di internasional komersial arbitrase, telah telah diikuti di investasi perjanjian arbitrase. Dalam kasus lain, pengadilan telah memerintahkan para pihak untuk menanggung biaya mereka dan membagi biaya dan pengeluaran para arbiter dan biaya Centre secara setara. Dalam sejumlah kasus, pengadilan arbitrase juga mempertimbangkan sifat sengketa dan perilaku para pihak.

Pengadilan mencatat bahwa kasus ini telah menimbulkan masalah hukum yang penting dan kompleks dan baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan argumen yang berbobot untuk mendukung posisi mereka masing-masing. Pengadilan menemukan bahwa, dalam keadaan arbitrase khusus ini, penerapan prinsip “pecundang membayar” adalah tepat. Itu tidak menganggap bahwa baik Partai prosedural perilaku di dalam arbitrase telah menjadi sedemikian rupa sehingga harus diperhitungkan dalam pembagian biaya.

Pengadilan mencatat bahwa semua keberatan yurisdiksi yang diajukan oleh Termohon telah ditolak tetapi klaim berbeda dari Penggugat atas pelanggaran BIT telah ditolak secara substansial. Pada keseimbangan,

yang hasil dari yang kasus telah disukai para Termohon untuk besar batas.

Dalam pandangan dari para hasil dari para kasus dan yang signifikan disproporsi antara yang biaya masing-masing Pihak, Pengadilan memandang adil dan wajar bahwa biaya proses akan dibayar oleh para Pihak sebagai berikut: setiap Pihak wajib menanggung nya sendiri biaya tetapi penggugat akan mengganti Termohon untuk sebagian dari biaya yang terakhir sebesar US \$ 7.000.000,00 dan, sebagai tambahan, membayar semua biaya dan pengeluaran Pengadilan dan biaya administrasi serta pengeluaran ICSID.

Biaya dari peradilan adalah sebagai berikut (dalam US \$):²⁵

Biaya dan pengeluaran arbiter
- Profesor Piero Bernardini: US\$ 482.887,01
- Tn. Gary Lahir: US \$ 307.349,27
- Hakim James Crawford: US\$ 155.477,80

Biaya dan pengeluaran admin ICSID (perkiraan) : US \$ 540.000,00

Total : US \$ 1.485.714,08

Untuk alasan-alasan yang disebutkan di atas, Pengadilan memutuskan sebagai berikut:

(1) Klaim Penggugat dibatalkan; dan

(2) Penggugat akan membayar kepada Termohon sejumlah US \$ 7 juta karena biaya sendiri, dan akan bertanggung jawab untuk semua biaya dan pengeluaran Pengadilan dan biaya administrasi ICSID dan biaya, mengembalikan kepada Termohon semua jumlah dibayar

²⁵ DECISION ON JURISDICTION, <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1531.pdf>, diakses pada 28 Desember 2020

dengan itu ke Pusat di akun itu.

KESIMPULAN

Dalam keputusan mayoritas, pengadilan menolak semua klaim yang dibuat oleh Philip Morris dan menegakkan legalitas dari dua tindakan pengendalian tembakau yang diberlakukan oleh Uruguay untuk tujuan melindungi kesehatan masyarakat. Pengadilan memerintahkan Philip Morris untuk menanggung semua biaya arbitrase dan membayar Uruguay USD 7 juta sebagai penggantian sebagian dari biaya hukum negara.

Arbiter yang ditunjuk penggugat, Gary Born, mengeluarkan pendapat berbeda. Dia tidak setuju dengan mayoritas dalam penilaiannya terhadap Persyaratan Presentasi Tunggal, dengan alasan bahwa persyaratan itu tidak diperlukan atau dipertimbangkan oleh WHO FCTC. Lebih lanjut, berdasarkan latar belakang faktual dan catatan pembuktian di Uruguay, ia menganggap bahwa Persyaratan Presentasi Tunggal secara nyata sewenang-wenang dan tidak proporsional serta merupakan pelanggaran perlakuan yang adil dan merata.

Philip Morris berpendapat bahwa Persyaratan Presentasi Tunggal dan Peraturan 80/80 merupakan pengambilalihan tidak langsung atas aset mereka, termasuk kekayaan intelektual dan niat baik yang terkait dengan masing-masing varian mereka. Menurut Uruguay, langkah-langkah tersebut tidak dapat merupakan pengambilalihan terutama karena tindakan tersebut merupakan pelaksanaan yang sah dari kekuasaan polisi yang berdaulat untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Pengadilan dengan suara bulat setuju dengan argumen Uruguay. Pertama, dikonfirmasi bahwa tindakan tersebut tidak berdampak pada perampasan investasi yang substansial karena Philip Morris dapat melanjutkan

bisnisnya dengan menjual produk tembakau di Uruguay. Pengadilan bisa saja berhenti di sana, tetapi menganggap relevan untuk membahas kewenangan polisi Uruguay untuk lebih mendukung temuannya bahwa tidak ada pengambilalihan.

Dalam pandangan pengadilan, adopsi Uruguay atas langkah-langkah yang ditentang adalah pelaksanaan kekuasaan polisi negara bagian yang sah. Penghargaan tersebut memperjelas bahwa kebijakan kesehatan masyarakat terkait dengan peningkatan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, dinyatakan bahwa melindungi kesehatan masyarakat telah lama diakui sebagai perwujudan esensial dari kekuatan polisi negara bagian. Pengadilan menyimpulkan bahwa Persyaratan Presentasi Tunggal dan Peraturan 80/80 telah diadopsi sebagai pemenuhan kewajiban hukum nasional dan internasional Uruguay untuk perlindungan kesehatan masyarakat. Langkah-langkah tersebut juga memenuhi persyaratan doktrin kekuasaan polisi karena diadopsi dengan itikad baik dan untuk tujuan melindungi kesehatan masyarakat serta tidak diskriminatif dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

C. Brower and S. Schill, "Is Arbitration a Threat of a Boon to the Legitimacy of International Investment Law?", 9 *Chicago Journal of International Law*. 2009, hlm. 472.

Crosbie E, Gonzalez M, Glantz SA. Health preemption behind closed doors: trade agreements and fast-

- track authority. *Am J Public Health* 2014;104:e7–13.
- Jurnal UMY, Hlmn 10 <http://repository.umi.ac.id/bitstream/handle/123456789/12829/BAB%20I%20F%20IX.pdf?sequence=5&isAllowed=y> (diakses pada 30 Oktober 2020)
- Liberalisme dan Komunitarianisme, <http://ejournal.unp.ac.id/index.php/jd/article/viewFile/1063/896> diakses pada 12 November 2020
- Mamudu HM, Hammond R, Glantz SA. International trade versus public health during the FCTC negotiations, 1999-2003. *Tob Control* 2011;20:e3.
- S. Spears. “The Question for Policy Space in a New Generation of International Investment Agreements,” 13 *Journal of International Economic Law* 1037. 2010, hlm. 4.
- Yong HH, Borland R, Cummings KM, et al. Impact of the removal of misleading terms on cigarette pack on smokers' beliefs about 'light/mild' cigarettes: cross-country comparisons. *Addiction* 2011;106:2204–13.

Buku:

- Christian Tietje. *The Impact of Investor-State-Dispute Settlement (ISDS) in the Transatlantic Trade and Investment Partnership*. Juni 2016, hlm. 15
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013, *Pentingnya Akses Konvensi Kerangka Kerja Pengendalian Tembakau (FCTC) bagi Indonesia*, PT.Gramedia, Jakarta, Hlmn 1
- Mohtar Mas'ood, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional dan Metodologi*. Yogyakarta:LP3ES.

Internet

- Cigar production in Latin America”, *bbc* <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44035162>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2020 pukul 18.03
- Discover Who We Are”, Philip Morris International <https://www.pmi.com/who-we-are/overview>> Diakses pada tanggal 09 Maret 2020 pukul 20.40
- https://www.constituteproject.org/constitution/Uruguay_2004.pdf?lang=en, diakses pada 22 Maret 2020 pukul 12.14
- Ordinance 514, <https://www.tobaccocontrollaws.org/litigation/decisions/uy-20160708-philip-morris-srl-v-uruguay> diakses pada 07 November 2020
- Philip Morris International Inc.’s Best Region in 2015”, *The Motley Fool*, 23 Desember 2015 <https://www.google.com/amp/s/www.fool.com/amp/investing/general/2015/12/23/philip-morris-international-incs-best-region-2015.aspx>> Diakses tanggal 10 Maret 2020 pukul 09.17
- Request for Arbitration, <https://www.italaw.com/sites/default/files/case-documents/ita0343>. Pdf, diakses pada 28 Desember 2020
- Rules of the FCTC, http://www.who.int/fctc/cop/cop_ro_p_text_english.pdf diakses pada 07 November 2020
- The History of ICSID, <https://icsid.worldbank.org/resources/publications/the-history-of-the-icsid-convention> diakses pada 03 Januari 2021